

**PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
MENGURANGI RISIKO KORUPSI
(Studi Kasus di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah , Sumatera Utara)**

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelarpar Magister Hukum
(M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

Michael W. Sembiring
NPM : 71230123156

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



MAGISTER ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

**PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
MENGURANGI RISIKO KORUPSI**
(Studi Kasus di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah , Sumatera Utara

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

Michael W. Sembiring
NPM : 71230123156

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Juli 2025

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Danialsyah, S.H.,M.H

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	36
F. Keaslian Penelitian	43
G. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Metode Pendekatan	47
3. Alat Pengumpulan Data	49
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	51
5. Analisis Data	54
BAB II : PENGATURAN HUKUM DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LKPP PROVINSI SUMATERA UTARA.....	56

A.	Landasan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia	56
B.	Kelembagaan dan Tata Kelola LKPP Provinsi Sumatera Utara	64
C.	Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Pengadaan	74
BAB III	: MEKANISME TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LKPP PROVINSI SUMATERA UTARA	87
A.	Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	87
B.	Implementasi Mekanisme Transparansi dalam Menanggulangi Korupsi	95
C.	Implementasi Mekanisme Akuntabilitas dalam Menanggulangi Korupsi	103
BAB IV	: HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LKPP PROVINSI SUMATERA UTARA	112
A.	Identifikasi Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	112
B.	Strategi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	127
C.	Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan dan Rekomendasi Perbaikan.....	132
BAB V	: PENUTUP	139
A.	Kesimpulan	139
B.	Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, Dodiet. 2013. Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian. Surakarta: Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- Andrianto, Nico. 2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Danil, H. Elwi. 2014. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada.
- Handyaningrat, Soewarno. 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Hajimasagung.
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, Rudy. 2015. Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Muhadjir, Neong. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Mulyadi, Lilik. 2011. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: P.T. Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2005. Politik Hukum Pidana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qirom Samsudin M, A., & Sumaryo E. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

- Sedarmayanti. 2012. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2016. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sigalingging, Bisdan. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal. Medan: Umsu Press.
- Soejono D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, D. 2024. Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indah.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Swastha, Basu., & Sukotjo, Ibnu. 2002. Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Widodo, J. 2017. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. 2016. Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. Medan: Perdana Publishing.
- Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunara, Edi. 2012. Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus). Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Transformasi Digital Pengadaan.

C. Jurnal/Artikel/Disertasi/Tesis

Abdul, A. 2020. Teknik Analisis Data Analisis Data. Teknik Analisis Data Analisis Data, 1–15.

Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agustin, T. S. 2024. Upaya Preventif Terhadap Pencegahan Korupsi: Fraud Control Plan dan Ethical Leadership (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali). Doctoral Dissertation, Nusa Putra University.

Alwan, R. D., Al Furqon, A., & Muhajir, A. 2024. Korupsi 4.0: Membangun Sistem Pencegahan Korupsi di Era Transformasi Digital. Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa, 2(2).

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. 2024. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321-334.

- Dewi, N.K.J.K., Atmadja, A.T., & Herawati, N.T. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *Jurnal Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Dwijayanti, M. 2025. Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 4(1), 15-24.
- Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, L. D. T. S. 2023. Korupsi dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Gea, A. Y. 2024. Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran. *Unes Law Review*, 6(4), 10989-11001.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I.B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal*, 5.
- Kusnadi, T., Saepudin, U., & Nuridah, S. 2024. Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 481-492.
- Liu, X., Wang, W., & Huang, S. 2024. Criminal Enforcement and Environmental Performance: Evidence From China. *Ecological Economics*, 224, 108267.
- Lubis, A. F. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Majid, Jamaluddin. 2021. Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government di Indonesia. *Jurnal: Assets*, 11(2), 190.
- Makmur, S., & Bantilan, M. M. R. 2024. Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 22-28.

- Mulyadi, Lilik. 2011. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyani, Y. 2024. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), 6, 662-667.
- Mulgan, R. 2000. Accountability: An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.
- Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. 2024. Kajian Hukum Tentang E-Tendering dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 447-459.
- Octaria, D., Rahmiati, R., Soraida, S., Zulaika, T., Oktavia, R., & Diarsyad, M. I. 2024. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 377-401.
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. 2024. Whistleblowing dan Korupsi pada Sektor Publik: A Systematic Review. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 94-113.
- Pasaribu, F.J. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Prasetio, L. 2024. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 2(3).
- Pratiwi, G. D., & Lestari, O. 2024. E-Catalog Dapunta Inc Menggunakan Metode Rational Unified Process (RUP). Doctoral Dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
- Putri, Elnanda. 2024. Peran Pemoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Untuk Meningkatkan Pengaruh Regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Terhadap Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa (Studi di

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten). Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rosdinar, Viki A., Satoto, S., & Syamsir, S. 2024. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Konstruksi Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum.

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. 1987. Accountability in The Public Sector: Lessons From The Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.

Safitri, A., Zain, A. N. A., & Nugroho, L. D. 2025. Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mencegah Praktik Korupsi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12-12.

Samudra, N. N. M., Siburian, D. R., Hasanah, N. C., & Siregar, O. K. 2024. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 48-54.

Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. 2025. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235-244.

Suhfien, I. 2024. Akuntabilitas Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh UMKM di Kota Baubau. Doctoral Dissertation, Universitas Nasional.

Syafrina, N. 2024. Tanggungjawab Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Binjai (Studi Pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa). Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Toule. 2016. Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 7.

Umami, R., & Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(11).

Utari, Indah Sri. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi: Faktor Penyebab Korupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Wedha, Y. Y., Mukti, H., & Turymshayeva, A. 2025. Unraveling The Complex Policies Regulating Conflicts Of Interest and Criminal Corruption. *Journal Of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 33-59.
- Weldy, L. 2024. Peningkatan Telaah Pada Katalog Elektronik Lokal Dengan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP). *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(1), 17-23.
- Wibowo, R. A., Huddiankuwera, A., Yunianta, A., Indrawati, C. M., & Barends, R. 2025. Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pakem Amata*, 5(1), 13-18.
- Wijaya, A. M. P., & Astuti, D. S. P. 2024. Pengaruh Akuntabilitas dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Peran Audit Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(2), 622-632.
- Yasmirah, Y., Halawa, F., Tandiono, S., & Zarzani, T. R. 2021. Criminal Acts of Corruption Procurement of Goods and Services of Local Governments Through Electronic Procurement Services (LPSE). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 4678-4684.

D. Internet

- Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2025. Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk Dari Korupsi. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>